

VENEZUELA'S HYPERINFLATION: THE IMPACT ON STRATEGIC POSITION OF UNITED STATES OF AMERICA-VENEZUELA

HIPERINFLASI VENEZUELA: DAMPAKNYA TERHADAP POSISI STRATEGIS AMERIKA SERIKAT-VENEZUELA

Tegar Budisatria^{1*}, Binsar Hamoraon Hasibuan¹, Rezha Hidayat Dwiputra¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Surel: satriategar.lcs@gmail.com

Abstract

This paper aims to describe the strategic position between the United States and Venezuela in the context of Venezuela's hyperinflation. Since 2016 Venezuela has experienced severe currency volatility and has become a backward country due to mismanagement of its economic policies. The occurrence of this phenomenon is known to have its roots in state takeovers of private companies in leading sectors and massive subsidies without a safety net during the oil price boom under Hugo Chavez's leadership. This instability was then inherited by his successor, Nicolas Maduro, which marked the weakening of the Venezuelan economy. Maduro initiated a policy of massive money printing and redenomination which in fact further increased domestic inflation. This is also directly proportional to the dynamics of the US-Venezuela relationship which started from the capitalist camp with the same pattern of interdependence. Over time, the spirit of Bolivarianism that strengthened in the Chavez and Maduro eras had a major impact on the relations between the two countries in terms of their strategic position. This of course has implications both at the level of ideology and trade between countries. This paper uses a qualitative-descriptive research method with a literature study as a data source in describing the research problem. The researcher uses the theory of realism as an analytical lens and the conception of Bolivarianism which explains the behaviour of Venezuela as a country overshadowed by a struggle for power.

Keywords: *Venezuela; United States; Hyperinflation; Bolivarianism; Realism.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana posisi strategis antara Amerika Serikat dan Venezuela dalam konteks hiperinflasi Venezuela. Sejak tahun 2016 Venezuela telah mengalami ketidakstabilan mata uang yang parah dan menjadi negara terbelakang karena kebijakan perekonomian yang salah urus (*mismanagement*). Terjadinya fenomena ini diketahui berakar dari pengambilalihan oleh negara atas perusahaan swasta di sektor unggulan dan subsidi besar-besaran tanpa jaring pengaman selama meledaknya harga minyak di kepemimpinan Hugo Chavez. Ketidakstabilan ini kemudian diwarisi oleh penerusnya yaitu Nicolas Maduro yang menandai semakin melemahnya ekonomi Venezuela. Maduro menggagaskan kebijakan pencetakan uang besar-besaran dan redenominasi yang nyatanya semakin meningkatkan inflasi dalam negeri. Hal ini juga berbanding lurus dengan dinamika hubungan AS-Venezuela yang dimulai dari kubu kapitalis dengan pola interdependensi yang sama. Seiring waktu, semangat bolivarianisme yang menguat di era Chavez dan Maduro berdampak besar pada hubungan kedua negara dalam memandang posisi strategis mereka. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam tataran ideologi maupun perdagangan antar negara. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka sebagai sumber data dalam mendeskripsikan masalah penelitian. Adapun penulis menggunakan teori realisme sebagaiacamata analisis serta konsepsi bolivarianisme yang menjelaskan perilaku Venezuela sebagai sebuah negara yang dibayangi *struggle for power*.

Kata Kunci: Venezuela; Amerika Serikat; hiperinflasi; Bolivarianisme; Realisme.



Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol.27. No.1, bulan Juni, tahun 2022
P-ISSN: 2442-3424; E-ISSN: 2775-7501
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/index>

Diajukan: 10 Mei 2022

Direvisi: 25 Juni 2022

Diterima: 28 Juni 2022

Sitasi: Budisatria, T., Hasibuan, B. H., dan Dwiputra, R. H. (2022). Hiperinflasi Venezuela: Dampaknya Terhadap Posisi Strategis Amerika Serikat-Venezuela. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 27 (1), 63-80.

Pendahuluan

Negara-negara di Amerika Selatan sudah sejak lama mengalami dilema politik serta ketidakpuasan terhadap pemerintah, disinyalir bahwa hal tersebut dipicu oleh meroketnya inflasi, krisis politik, kekuasaan, ekonomi, energi, bahkan pangan dan obat-obatan. Dalam tulisan kali ini Penulis akan membahas mengenai hiperinflasi yang terjadi di Venezuela dan pergolakan politik luar negeri antara Venezuela dan Amerika Serikat (AS), yaitu mengapa krisis Venezuela ini dapat mempengaruhi hubungan antara AS dan Venezuela? Telah diketahui sejauh ini adanya dinamika persaingan ideologi serta hubungan diplomatik kedua negara di bidang perdagangan dengan krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela. Venezuela merupakan salah satu negara yang ekonominya bertumpu pada hasil penjualan minyak, hal ini dikarenakan oleh berlimpahnya cadangan emas hitam ini di tanah Venezuela. Namun, di tahun 2014 harga minyak dunia mengalami penurunan yang sangat drastis (VOA Indonesia, 2014). Otomatis Venezuela tak luput dari defisit pemasukan yang mengakibatkan kerugian besar dan menjatuhkan ekonomi Venezuela pada krisis ekonomi berkepanjangan, hal ini diperparah oleh adanya hiperinflasi mata uang bolivar, IMF memprediksi bahwa inflasi Venezuela akan mencapai 1.000.000% pada akhir tahun 2018 dan akan terus meningkat (CNN Indonesia, 2018).

Venezuela secara resmi menyatakan status darurat ekonomi negaranya pada tanggal 15 Januari 2016 oleh Presiden Nicolas Maduro. Sebelumnya Venezuela mengalami beberapa gejolak politik pasca meninggalnya presiden sebelumnya Hugo Chavez tanggal 5 Maret 2013. Pada saat pergantian itu, ia telah mewarisi kebijakan ekonomi yang secara umum dapat dikatakan tidak berkelanjutan dan kebergantungan pada ekspor minyak dan kekuarangan pangan berkelanjutan (CNN Indonesia, 2018). Selama pemerintahannya, Maduro juga dinilai terlalu meremehkan penggunaan alternatif sumber cadangan devisa. Hal ini menjadi pukulan besar bagi ekonomi Venezuela ketika harga minyak jatuh pada tahun 2014. Di saat negara lain mengatasi fenomena ini dengan penyesuaian kebijakan fiskal seperti kenaikan pajak dan pemotongan anggaran, pemerintahan Maduro malah menginstruksikan pencetakan uang pada Oktober 2017 yang diikuti redenominasi pada Agustus 2018 yang justru semakin meningkatkan inflasi (EFE, 2017; EFE, 2018).

Merespon krisis ini, Amerika Serikat melihat adanya peluang yang dapat menguntungkan terlebih, gejolak krisis besar yang melanda Venezuela mendorong Amerika Serikat untuk melakukan intervensi-intervensi demi melindungi kepentingan Amerika di Venezuela. Hubungan antara Amerika dan Venezuela hingga kini dapat dikatakan sering bersitegang, terutama berkaitan dengan persaingan ideologi dan perdagangan di antara kedua negara. Dari tahun 1999, AS seringkali terlibat hubungan panas dengan Venezuela, namun jika ditilik lebih dalam lagi, kedua negara ini sesungguhnya sangat bergantung satu sama lain sebagai mitra dagang. Dikutip dari BBC (2019), RANDS Corporation yang merupakan lembaga kajian kebijakan global menyatakan bahwa sudah sejak lama Amerika menjadi pembeli utama dari minyak Venezuela sementara Venezuela mengimpor dari Amerika pengencer minyak yang digunakan untuk produk ekspor ke AS.

Hiperinflasi sendiri berasal dari kata inflasi yang memiliki arti kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus menerus mengalami kenaikan (Rahardja dan

Manurung, 2004: 155). Secara umum inflasi juga dapat diartikan sejumlah uang yang beredar pada masyarakat terlalu banyak, yang mengakibatkan daya beli uang tersebut menurun (Mangkoesoebroto dan Algifari, 1998: 165). Dari kedua definisi inflasi di atas, bisa kita ketahui bahwa ketika suatu negara mengalami inflasi, keadaan mata uang di negara tersebut mengalami penurunan nilai yang bisa disebabkan oleh kenaikan harga barang secara terus-menerus dan diikuti penyebaran jumlah uang yang berlebihan di masyarakat. Dalam menentukan dan mengukur inflasi dari waktu ke waktu biasanya digunakan suatu angka indeks, kemudian disusun sesuai dengan memperhitungkan sejumlah barang yang akan digunakan untuk menghitung besarnya nilai inflasi yang terjadi dan biasanya dituliskan dalam bentuk persentase (Suseno dan Aisyah, 2009: 3). Untuk mencapai hiperinflasi, suatu negara akan melalui beberapa tahapan atau tingkatan tertentu untuk benar-benar bisa dikatakan sedang mengalami hiperinflasi. Berikut merupakan empat tingkatan atau tahap dari inflasi (Sari, 2017: 20):

1. Inflasi Rendah (<10%).
2. Inflasi Menengah (10-30%).
3. Inflasi Berat (30-100%).
4. Hiperinflasi (>100%).

Dari keempat tahapan tersebut, dapat dilihat bahwa suatu negara dapat dikatakan mengalami hiperinflasi ketika mata uang tersebut mengalami penurunan lebih dari 100%. Melihat hal tersebut, sesuai dengan tulisan ini. Penulis beranggapan bahwa Venezuela yang telah mengalami inflasi sebesar 1.000.000% menurut data dari Forbes (2018), serta krisis tersebut telah berlangsung secara berkepanjangan dapat penulis kategorikan sebagai hiperinflasi.

Konsep lain yang juga penulis gunakan dalam tulisan ini adalah bolivarianisme atau yang biasa disebut Revolusi Bolivarian. Konsep ini menjelaskan sebuah gerakan atau proses politik di Venezuela yang dipimpin oleh mantan Presiden Venezuela Rafael Hugo Chavez Frias atau yang biasa kita kenal sebagai Hugo Chavez. Kepemimpinan Hugo Chavez yang pada saat itu dapat dikatakan sebagai tokoh beraliran “kiri”, menginisiasi sebuah pemikiran yang kemudian menjadi ideologi atau dasar setiap kebijakan yang dibuat pemerintah Venezuela pada masa itu. Akar dari pemikiran ini merupakan warisan dari perjuangan Amerika Selatan pada abad ke-19 oleh pahlawan kemerdekaan Venezuela pada saat itu yaitu Simon Bolivar (Ferdiansyah, 2014: 4). Dalam pengertian lain, Revolusi Bolivarian juga dapat diartikan sebagai sebuah respon terhadap proses globalisasi neoliberal yang memperbesar kesenjangan antara rakyat kaya dan rakyat miskin, dalam konteks negara utara dan negara selatan (Ferdiansyah, 2014: 4). Saat masa kepemimpinannya, Chavez melakukan misi sosial Bolivarian guna melawan kapitalisme dan konsensus yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mempromosikan model pembangunan sosial ekonomi secara populis dan alternatif kerjasama ekonomi diantara negara-negara miskin di Amerika Selatan. Berikut penulis memberikan beberapa contoh misi sosial dan kebijakan bolivarian milik Chavez, antara lain (Levin, 2007: 47):

1. Kedaulatan ekonomi dan politik Venezuela (anti imperialisme).
2. Partisipasi politik akar rumput dari populasi rakyat melalui pemilihan umum, referendum, dan kebebasan berorganisasi.

3. Swasembada ekonomi (pangan, obat, dan daya konsumsi).
4. Memicu sentimen nasional dan pelayanan publik.
5. Distribusi merata hasil pendapatan minyak.
6. Menghapus korupsi dan menghapus *puntofijismo* (pembagian kekuasaan di antara dua partai) dengan cara konstitusional.

Di masa-masa selanjutnya, bolivarianisme itu tidak hanya sampai pada kepemimpinan Chave, Nicolas Maduro yang naik untuk menggantikan Chavez pun tetap teguh untuk melanjutkan paham Bolivarian yang sudah berjalan. Walaupun saat kondisi Venezuela dilanda krisis dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa Revolusi Bolivarian yang dibawa Hugo Chavez, waktu itu merupakan penyelamat mereka. Hal tersebut karena Revolusi itu berhasil memberikan dampak yang baik kepada masyarakat miskin Venezuela, demi menghapus kesenjangan ekonomi kaya-miskin. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa bolivarianisme merupakan suatu paham atau kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkan oleh negara Venezuela dalam upaya penolakan kapitalisme dan penyebaran neoliberal oleh Amerika Serikat. Bolivarianisme beranggapan bahwa dengan masuknya neoliberal ke negara mereka hanya akan menyebabkan mereka semakin terpuruk oleh hutang, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi.

Konsep lain yang juga perlu kami jelaskan dalam membantu proses analisa adalah *struggle of power*. Konsep ini sering ditemukan pada perspektif Realisme. Istilah tersebut pertama kali disebut oleh Hans J. Morgenthau yang menyatakan bahwa “*international politic is struggle of power*” yang menjadikannya fokus dari kaum realis sendiri. Hal tersebut dipertegas dengan perlakuan tiap negara yang akan selalu memperhitungkan *cost and benefit* atas setiap perbuatan yang akan dilakukannya (Asrudin, 2014). Dalam anarki internasional *struggle of power* dapat dimaksudkan sebagai perjuangan demi kekuasaan yang diperlukan negara untuk mempertahankan diri, dalam arti lain *struggle of power* dapat diartikan sebagai suatu atau sekumpulan negara yang memperjuangkan kepentingan nasional (*national interest*) sebagai tujuan utamanya, baik dalam sektor militer, politik maupun ekonomi (Asrudin, 2014).

Realisme merupakan suatu paradigma yang konsepnya telah dikenal sejak lama. Salah satu literatur yang telah ada sejak sebelum masehi mencatatkan konsepsi dari paradigma ini, yaitu *The Peloponnesian War* oleh Thucydides. Paradigma Realisme dalam hubungan internasional selalu didasarkan pada realitas atau kenyataan dari hubungan antar negara-negara yang anarki daripada yang seharusnya. Menurut kaum realis, hubungan antar negara-negara di dunia pada kenyataannya anarki, hal ini dikarenakan oleh sifat dasar manusia yang konfliktual yang selalu menginginkan keuntungan dan tidak dapat menghormati otoritas yang berada diluar ataupun di atas negaranya (Asrudin, 2014: 111). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisme menerapkan unsur oportunisme dalam melihat lingkungannya serta pragmatis dalam mengambil langkah-langkah untuk memecahkan masalah walaupun langkah-langkah tersebut bukan rencana jangka panjang. Kaum realis juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip moral tidak dapat menjelaskan pola perilaku suatu negara. Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa politik tidak membutuhkan pembenaran moral (Asrudin, 2014: 112). Alasannya adalah ada perbedaan mendasar antar

politik internasional yang diharuskan oportunistik serta tidak adanya otoritas yang lebih tinggi dari negara dan politik domestik dimana negara dapat mengendalikan moralitas individu di dalamnya (Asrudin, 2014: 112).

Untuk lebih memahami paradigma realisme ini, Viotti dan Kauppi (2012: 39) mengemukakan adanya empat ciri dari teori realisme ini. Pertama, negara merupakan aktor dominan yang berperan penting dalam politik internasional yang anarki, realisme memandang bahwa aktor-aktor selain negara seperti organisasi internasional ataupun perusahaan internasional tidaklah memiliki peran yang penting walaupun tetap diakui sebagai aktor dalam politik internasional. Kedua, negara merupakan suatu kesatuan aktor dimana negara seorang diri mampu untuk merepresentasikan atau menyuarakan kepentingan nasional yang sama dan terintegrasi secara terpusat dan terkontrol sebagai bentuk otoritas tertinggi (Viotti dan Kauppi, 2012: 39). Ketiga, negara adalah aktor rasional, hal ini karena negara berperan penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri, negara dapat mempertimbangkan segala aspek mulai dari kapasitas, kapabilitas, kepentingan, alternatif kebijakan, *cost and benefit*, dan lain-lain (Viotti dan Kauppi, 2012: 40). Keempat, mengutamakan keamanan nasional, menurut realis keamanan nasional dapat tercapai dengan meningkatkan *power* suatu negara oleh karenanya kapasitas dan kapabilitas militer serta isu-isu strategis merupakan kepentingan utama (Viotti dan Kauppi, 2012: 40).

Selanjutnya dalam tulisan ini kami menggunakan tiga esensi dasar dalam realisme untuk menjelaskan fenomena yaitu *statism*, *self-help*, dan *survival*. *Statism* maksudnya adalah negara menjadi fokus utama atau aktor utama dalam konflik dan sebagai aktor rasional (Baylis dan Smith, 2001: 4). *Self-help* adalah didalam sistem yang anarki, negara harus dapat mandiri/menolong diri sendiri serta tidak dengan mudah percaya dengan negara lain atau aktor-aktor lain (Baylis dan Smith, 2001: 4). Sedangkan *survival* muncul karena kecenderungan suatu negara untuk menguasai negara lain hingga muncul upaya defensif untuk mempertahankan kedaulatannya dari kekuasaan negara lain (Baylis dan Smith, 2001: 4). Dengan konsep ini penulis dapat menelaah lebih lanjut tentang krisis yang terjadi di Venezuela serta hubungannya dengan politik luar negeri AS terhadap Venezuela maupun sebaliknya. penulis melihat bahwa tindakan defensif Venezuela terhadap politik luar negeri AS sebagai implementasi dari konsep 3S ini.

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Adapun pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah menurut Creswell di mana data-data penelitian yang didapatkan berbentuk kata atau teks yang dianalisis dan kemudian diinterpretasi secara bertahap dengan struktur tulisan yang induktif (Raco, 2013: 7). Fokus bahasan dalam penelitian ini berpusat pada dinamika dan potensi hubungan perdagangan strategis antara Venezuela dan AS melalui sudut pandang Venezuela yang terdampak hiperinflasi. Dalam mengambil sumber rujukan data baik primer dan sekunder, penulis menggunakan teknik literatur review pada buku dan jurnal/artikel ilmiah baik dalam bentuk cetak dan digital. Adapun penulis juga menggunakan website dan artikel berita online yang kredibel dan dapat di

pertanggungjawabkan. Selanjutnya teknik analisis dalam tulisan ini dimulai dari pengumpulan data yang relevan dengan topik yang dibahas dan kemudian dilakukan reduksi dengan menyeleksi dan meringkas data. Penulis kemudian menyajikan data-data tersebut secara naratif dan terstruktur agar mudah dipahami. Adapun teori realisme yang dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka pikir dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Diskusi

Menilik sejarah dari hubungan diplomatik antara Venezuela dan Amerika Serikat, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Amerika sempat menaruh minat besar terhadap upaya rakyat Venezuela untuk merdeka dari penjajahan Spanyol. Dua tokoh terkemuka Venezuela yaitu Simon Bolivar dan Francisco Miranda kemudian berkunjung ke Amerika Serikat untuk menjalin relasi dengan tokoh politik terkemuka Amerika Serikat serta mempelajari konstitusi dan deklarasi kemerdekaan. Bukti hubungan diplomatik Amerika Serikat di Venezuela pertama kali adalah konsulat yang dibuka di kota Maracaibo pada tahun 1824. Pada saat itu status Venezuela sendiri masih merupakan bagian dari Federasi Kolombia. Menyusul pemisahan dari Federasi Kolombia, Amerika kemudian mengakui Venezuela sebagai negara merdeka pada 28 Februari 1835 (US Embassy in Venezuela, n.d.). Selanjutnya hubungan perdagangan mulai gencar dilakukan antara Amerika dan Venezuela, tercatat perjanjian perdagangan bilateral pertama kali ditandatangani 20 Januari 1836 (US Embassy in Venezuela, n.d.). Dari penjelasan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa jauh sebelum Chavez naik sebagai presiden, Venezuela telah memiliki hubungan yang amat dekat dengan Amerika Serikat. Berdasarkan analisis historis keduanya memiliki kepentingan yang saling mendukung, yaitu berupaya untuk menghentikan dan menghapuskan penjajahan di dunia. Selain itu, meskipun kedua negara memiliki perbedaan dalam banyak hal, perdagangan dan sejarah telah mengikat kedua negara ini sebagai mitra yang sangat kuat dalam waktu yang lama. Kemudian muncul pertanyaan apa yang menyebabkan perubahan pola hubungan yang pada awalnya saling mendukung ini menjadi rapuh?

Hutang luar negeri merupakan salah satu pembahasan yang cukup kompleks dalam berbagai kajian domestik maupun internasional. Ada banyak alasan dan faktor yang mempengaruhi mengapa suatu negara menerima pinjaman atau bantuan. Tak jarang ada negara yang menerima utang kedepannya mengalami krisis dan mengakibatkan ketidakmampuan untuk membayar, beberapa dari fenomena ini hingga saat ini masih belum terselesaikan. Hal serupa dialami oleh Republik Venezuela pada tahun 1990-an. Pemberian hutang luar negeri pada awalnya dirasakan manfaatnya bagi pemerintah dan rakyat Venezuela, namun secara perlahan-lahan segala bantuan yang diterima menimbulkan ketergantungan atau dependensi terhadap kekuatan kapitalisme global. Hingga pada suatu waktu negara secara sadar memiliki utang yang sangat banyak kepada negara pemberi bantuan. Krisis besar-pun tidak terhindarkan, melihat hal ini banyak orang akan berpikir untuk melepaskan diri dari jeratan investor asing dan utang yang bersifat mengikat. Hugo Chavez kemudian hadir dengan solusi populis hingga naik menjadi presiden Venezuela pada 2 Februari 1999 (Britannica, n.d.).

Dalam kasus Venezuela, mereka sempat meminta pinjaman dari *World Bank* yang berkolaborasi dengan IMF pada tahun 1989. IMF lalu memberikan syarat agar pinjaman dapat diberikan yakni Venezuela harus menyetujui nota kesepakatan untuk menjalankan program *Structural Adjustment Program* atau SAP. SAP tersebut mewajibkan Venezuela untuk melakukan liberalisasi di segala bidang yang mencakup ekspor, impor, keuangan dan kebijakan fiskal, memasukan investor asing, menjual aset (privatisasi), serta harus melakukan devaluasi mata uang (penurunan nilai mata uang). Akibatnya rakyat banyak yang menerima imbasnya yakni kenaikan pajak, penghapusan subsidi, harga barang pokok yang naik (Akbar dan Sandriati, 2011: 5). Setelah itu, Venezuela menerapkan SAP sebagai sebuah instabilitas. Pemerintah harus memotong sebagian besar anggaran untuk menurunkan inflasi, dan beberapa kebijakan SAP dirasa kurang efisien untuk diterapkan di Venezuela, banyak rakyat juga menunjukkan aksi protes besar-besaran terhadap kebijakan yang tidak menguntungkan mereka malah menjadi beban ekonomi yang terus melambung tinggi (Akbar dan Sandriati, 2011: 5).

Namun, berbeda dengan pernyataan World Bank, program SAP memang dapat memberikan dampak besar yang sulit untuk diterima oleh rakyat Venezuela kebanyakan. Namun, program ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Menurut World Bank (1989), keseimbangan ekonomi berkelanjutan dapat dicapai dengan: (I) memperkenalkan perubahan dasar dalam kerangka kerja dan dalam manajemen ekonomi makro; (II) mempromosikan dan meningkatkan persaingan ekonomi yang lebih besar; (III) menyediakan manajemen investasi publik dan perusahaan publik yang lebih efisien; dan (IV) meletakkan dasar untuk mengembangkan program sosial yang tepat dan efisien.

Selama tahun-tahun pertamanya menjabat sebagai presiden, Chavez berfokus untuk menstabilkan kondisi sosial ekonomi Venezuela. Chavez menekankan untuk segera melakukan reformasi politik dan menasionalisasi aset-aset yang penting, khususnya perusahaan minyak hal tersebut dikarenakan pemerintah pada saat itu memiliki sedikit sekali aset-aset yang dapat menopang ekonomi, sebagian besar pemasukan negara waktu itu berasal dari kerja sama dan bantuan sistem kapitalisme. Chavez kemudian memandang bahwa kekayaan minyak Venezuela dapat menjadi peluang untuk meredakan krisis dan memakmurkan rakyat. Nantinya, hasil pendapatan minyak itu akan dipergunakan untuk membiayai program-program Bolivarian Chavez dan perlahan-lahan dapat melunasi hutang-hutang Venezuela kepada IMF dan *World Bank* beberapa tahun lebih cepat dari tenggat waktu (Akbar dan Sandriati, 2011: 2). Chavez berpendapat bahwa keputusan untuk berhutang dengan IMF telah menyebabkan hiperinflasi yang tinggi di Venezuela. Oleh karenanya pelunasan hutang menjadi salah satu prioritas utama kabinet Chavez. Ketergantungan dengan hutang sesungguhnya menurut Chavez telah menjauhkan Venezuela dari keamanan ekonomi, karena fokus pemerintah dan pendapatan diprioritaskan untuk melunasi hutang dengan IMF dan World Bank. Padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Efek lainnya adalah perusahaan investor yang berinvestasi di Venezuela mulai mendikte pemerintah untuk memenuhi kepentingan investor dengan ancaman pengurangan pinjaman dalam program SAP. Secara rinci, Venezuela melunasi hutang dengan IMF di tahun yang sama saat

Chavez menjadi presiden yaitu tahun 1999, sedangkan *World Bank* di tahun 2007 dengan tenggat waktu maksimal tahun 2012. Secara tidak langsung Venezuela berhasil menghemat pengeluaran untuk membayar bunga sebesar US\$ 8 juta (Akbar dan Sandriati, 2011: 2). Kemudian dilanjutkan pada tahun 2007, Venezuela keluar dari IMF dan *World Bank* (Akbar dan Sandriati, 2011: 2).

Dalam melakukan reformasi, keluarnya Venezuela dari IMF dan Bank Dunia merupakan langkah besar. Penulis berpendapat bahwa hal ini diperlukan bagi Venezuela guna memperkuat negaranya menggunakan konsep *self-help* dengan memandang bahwa rezim internasional tidak dapat dipercaya. Oleh sebab itu, dalam menghadapi sistem perekonomian dunia, Venezuela berusaha membangun sebuah sistem yang mampu menopang dirinya secara mandiri serta tidak memiliki ketergantungan terhadap apapun. Sistem yang diciptakan Chavez salah satunya adalah mengubah dasar dan ideologi negara dari yang tadinya mengarah pada negara Liberal menjadi negara Sosialis oleh disahkannya undang-undang konstitusi sosialis bolivarian di Venezuela. Hal tersebut dicapai dengan dilakukannya Referendum oleh parlemen tanggal 19 April 1999 dengan mayoritas suara memilih setuju sebanyak 92%. Kemudian dilakukan pemungutan suara oleh rakyat untuk menyetujui konstitusi ini, hasilnya sebanyak 71,8 persen menyatakan setuju dengan konstitusi tersebut (Milan Indonesia, n.d.).

Bahkan ketika terjadinya kudeta 9 April 2002 oleh para borjuis dan kelas kapitalis setelah Chavez melakukan nasionalisasi aset-aset, pemerintah tetap memiliki dukungan kuat dari rakyat Venezuela terutama rakyat miskin dan rakyat yang menerima manfaat dari kebijakan Chavez masih loyal dengan kepemimpinan Chavez. Dukungan ini merupakan modal bagi Chavez dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya yang menyudutkan kaum liberal kapitalis, demi mewujudkan revolusi Bolivarian. Banyak kebijakan pemerintah dinilai sangat merugikan para pengusaha tidak hanya pengusaha asing, namun juga pengusaha dalam negeri. Mereka lalu membentuk FEDECAMARAS atau federasi kamar dagang di Venezuela sebagai oposisi pemerintahan yang didukung Amerika Serikat (FSEDAR, 2019).

Munculnya Chavez beserta proyek-proyek sosialisnya kemudian membuat Amerika Serikat Gusar, seperti yang kita tahu bahwa Amerika Serikat sangat besar pengaruhnya dalam rezim Internasional pada saat ini. Bahkan memiliki hak veto dalam keanggotaan PBB serta menginisiasi pembentukan *World Bank* dan IMF. Chavez dapat dibilang sukses dalam mengkonfrontasi pihak-pihak yang sejalan dengan AS serta menimbulkan keraguan bagi publik internasional dengan secara tidak langsung menyatakan bahwa negara kecil di Amerika Selatan pun mampu untuk menentang dan menolak sistem Neoliberal pasar bebas. Namun yang perlu dicatat bahwa kesuksesan ini tidaklah dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Chavez paham betul mengenai ekonomi AS sampai saat itu masihlah bergantung pada Venezuela terutama dalam sektor perdagangan minyak. Terbukti hingga tahun 2008 besarnya ekspor Venezuela ke AS mencapai US\$ 51,42 Milyar (Akbar dan Sandriati, 2011: 2).

Kegagalan kudeta menjadi catatan buruk bagi Amerika Serikat yang memiliki kepentingan di Venezuela. Alasannya adalah tindakan represif dari pendukung Chavez yang menolak dengan tegas terjadinya liberalisasi. Hal ini merupakan hambatan bagi

Amerika untuk melancarkan dan menyebarkan proyek-proyek neoliberalisme ke seluruh dunia. Di lain sisi alasan AS memiliki kepentingan di Venezuela tidak lain adalah kekayaan minyak dan gas yang dimiliki Venezuela. AS memiliki kepentingan strategi untuk dapat mengendalikan dan mempertahankan kendali atas negara-negara penghasil energi terutama minyak bumi dan gas alam. Dalam melawan kebijakan politik Chavez AS menggunakan Kolombia sebagai negara proksi untuk memantau dan mengendalikan negara-negara di Amerika Selatan. Pada 14 Agustus 2009, Amerika dan Kolombia mengadakan perjanjian kerja sama dalam sektor pertahanan yang dinamai *Defence Cooperation Agreement (DCA)*. Kesepakatan tersebut mengizinkan Amerika Serikat untuk menduduki dan membangun markas militer angkatan udara dan angkatan laut AS di Kolombia (Pratiwi, 2012: 2). kekhawatiran mulai bermunculan terutama oleh negara-negara sosialis Amerika Latin. Mereka mulai mengecam keputusan kolombia untuk menyewakan pangkalan militer kepada AS. Venezuela merespon politik AS ini dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas militernya. Chavez menyatakan bahwa penempatan pangkalan militer ini merupakan strategi AS untuk bebas memantau kegiatan perdagangan di Amerika Selatan, kebijakan selanjutnya adalah penarikan duta besar Venezuela dari Kolombia. Robert Jarvis menyebut pola kekhawatiran ini sebagai *Security Dilemma*. Dimana negara dapat mengambil langkah defensif maupun ofensif termasuk meningkatkan kekuatan militer, menjalin kerjasama, ataupun pemutusan hubungan diplomatik (Pratiwi, 2012: 3).

Selain melakukan kebijakan anti neoliberal dan anti kapitalis, Chavez juga menghimpun pertentangan melawan AS di Amerika Selatan. Dengan mengarahkan kepada unifikasi politik di Amerika Selatan melalui kerjasama ekonomi regional ALBA atau *Alternative Bolivariana Para Las Americana* pada tahun 2004. Hal tersebut guna menandingi dan memboikot pakta perdagangan bebas Amerika atau FTAA. Hugo Chavez menyampaikan bahwa ALBA bertujuan untuk mengadvokasi dan memicu pembangunan negara-negara berkembang di Amerika Latin dan Karibia hal ini pula yang membuat Venezuela bersama Kuba kemudian memosisikan dirinya sebagai *regional power* di Amerika Latin dan Karibia (Firdaus, 2019: 43). Penulis mendeskripsikan bahwa ALBA merupakan kerja sama antara negara kaya dan negara miskin. Negara kaya dalam keanggotaan ALBA hanya ada 3 yaitu Venezuela, Kuba dan Ekuador, ketiganya memiliki GDP lebih dari 100 miliar dollar AS. ALBA menurut Chavez didasarkan pada sistem Bolivarianisme Venezuela karena sama-sama berupaya untuk menghilangkan ketergantungan dengan sistem neoliberal dan kapitalis dengan membantu negara-negara miskin anggota ALBA.

Dalam melakukan kerja sama luar negeri, selain ALBA, Venezuela juga beraliansi dan berupaya untuk mendapatkan dukungan dengan negara-negara penentang AS. Seperti Rusia, China, Iran, dan Kuba. Semua itu secara sengaja dimaksudkan untuk menentang dominasi AS di Amerika Latin. Tak heran jika Venezuela mulai mendekati negara-negara yang dianggap berseberangan dengan AS. Chavez percaya bahwa dengan membuat blok ekonomi dengan negara-negara lawan AS maka, pengaruh buruk dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang di propagandakan oleh AS dapat diredam. Kerjasama dengan Iran merupakan pendekatan yang menarik untuk dibahas karena walaupun memiliki

perbedaan kondisi geografis, budaya, dan sosial, Venezuela berkeinginan untuk mengadopsi pola pikir Iran, terutama mempelajari pertentangan Nuklir dengan AS. Pembangunan kekuatan militer, ekonomi, dan kebijakan lainnya adalah hak dari setiap negara-negara di dunia. Otoritas tersebut juga dapat menjadi indikator dari kedaulatan sebuah negara, selain itu untuk melindungi diri sendiri dari negara asing, bukan malah sebagai kekuatan untuk menginterupsi dan menginvasi negara lain untuk mencapai kekuasaan. Venezuela dengan ini berupaya untuk menyadarkan Amerika bahwa ia bukanlah satu-satunya *superpower* penentu ideologi baik dan buruknya, semua negara memiliki hak yang setara dalam menerapkan atau mengimplementasikan ideologi dalam kebijakan domestik maupun luar negeri yang terbaik bagi negaranya. Hal ini pulalah yang dapat memperkuat alasan Venezuela mempertahankan ideologi bolivarianisme, bahkan hingga waktu Chavez tidak lagi berkuasa.

Pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2013, Presiden Hugo Chavez meninggal dunia. Dikutip dari Britannica.com, Chavez telah berjuang selama 2 tahun melawan kanker dan melewati 4 kali masa operasi. Sebelum Wafat, Chavez telah menunjuk wakil presidennya, Nicolas Maduro sebagai suksesor negara Bolivarian tersebut bahkan telah menjadi pemimpin de facto setahun sebelum Chavez wafat (Britannica, n.d.). Pemilihan umum kemudian diadakan pada bulan April 2013 yang dimenangkan oleh Nicolas Maduro atas pesaingnya Henrique Capriles Radonski dengan total suara 50,8 % suara (CNN Indonesia, 2018). Tipikal kepemimpinan Maduro memiliki arah pandang yang sejalan dengan pendahulunya. pada awal keterpilihannya ia menyatakan kepada rakyat Venezuela bahwa ia akan tetap terus berkomitmen dan melanjutkan sistem yang telah dimulai Hugo Chavez.

Sayangnya, dalam masa kepemimpinan Maduro tidaklah berjalan mulus seperti masa Chavez. Di antara tahun 2013 dan 2014 terjadi instabilitas dari harga minyak mentah. Pada umumnya turunnya harga minyak disebabkan oleh produksi minyak yang sangat berlebihan sehingga membanjiri pasar minyak dunia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kekayaan minyak dan Nasionalisasi perusahaan minyak Venezuela menjadikan negara hampir sepenuhnya bertumpu pada hasil penjualan minyak, logikanya bahwa jatuhnya harga minyak berarti menurunnya pendapatan nasional Venezuela. Ketergantungan terhadap minyak dan gas menjadikan Venezuela terjebak dalam sebuah krisis baru yang berbeda dari krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Krisis ini merupakan sebuah inflasi di mana negara terlalu banyak menghamburkan anggaran untuk kebijakan populis, tanpa memiliki alternatif sumber pendapatan. Meskipun begitu, Venezuela masih saja tetap melakukan peminjaman dan investasi asing walaupun dengan negara-negara kontra liberal kapitalis seperti China dan Rusia (BBC, 2019). Krisis ini memaksa Venezuela untuk memotong berbagai pengeluaran dan anggaran belanja. Bahkan menghentikan berbagai program populis bolivarian dan subsidi masyarakat yang sebelumnya ditopang pendapatan minyak. Sejak saat itu, setiap tahun kondisi ini semakin parah. Rakyat Venezuela banyak yang mengalami kekurangan bahan pangan hingga kelaparan. Hal tersebut memancing berbagai protes dan kerusuhan yang mengakibatkan kekerasan di seluruh penjuru negeri terkait masalah ekonomi (CNN Indonesia, 2018). Selanjutnya penulis merasa bahwa dalam pengambilan kebijakan oleh rezim Maduro

dirasa tidak tepat. Ada dua faktor yang penulis anggap merupakan sikap yang dapat merugikan Venezuela kedepannya, yaitu redenominasi mata uang dan pencetakan mata uang yang berlebih. Kebijakan redenominasi mata uang diambil pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagai langkah untuk melindungi dan menstabilkan mata uang lokal seperti yang dinyatakan Maduro dalam siaran yang dimuat kantor berita AFP (CNN Indonesia, 2018). Penulis berpendapat bahwa kebijakan ini hanya membuat perubahan terhadap angka yang tercetak pada mata uang Bolivar saja namun tidak demikian dengan nilainya. Pembuatan uang kertas baru juga memakan biaya yang tidak sedikit. Sementara kebijakan mencetak mata uang berlebih dilakukan untuk menarik dukungan rakyat miskin dan menutupi tenggat waktu pembayaran obligasi (Detik.com, 2018). Dalam ilmu ekonomi, penyebab utama dalam menurunnya nilai mata uang adalah peredaran mata uang yang berlebihan yang tidak sesuai dengan jumlah devisa negara.

Demonstrasi semakin banyak terjadi dan menuntut Presiden Maduro untuk mundur dari tampuk kepresidenan. Maduro pun terpaksa menggunakan militer untuk meredakan demonstrasi. Ribuan rakyat Venezuela kemudian banyak yang mengungsi, menurut PBB pada tahun 2019 sebanyak 5 juta orang diperkirakan akan mengungsi. Sebagian besar tujuan eksodus merupakan negara-negara di selatan Venezuela seperti Peru, Ekuador, dan Brazil (CNN Indonesia, 2019). Kecaman dilontarkan karena banyaknya penggunaan kekerasan, tak terkecuali Amerika. Amerika dapat memandang bahwa krisis ini merupakan momentum yang tepat untuk mengintegrasikan *power* di Amerika Latin. Power dalam realisme merupakan aspek yang krusial dalam mencapai hegemoni, hal ini dilakukan Amerika dengan memberi bantuan pangan dan obat-obatan bermotifkan kemanusiaan. Namun niat “baik” tersebut direspon secara negatif oleh Venezuela, dilansir dari CNN (2019), Maduro mengatakan bahwa Amerika merupakan pencuri miliaran dollar dan menawarkan “remah-remah” sebagai bantuan kemanusiaan. Bantuan-bantuan tersebut kemudian menumpuk di perbatasan Venezuela. Pemimpin oposisi Venezuela yang didukung Amerika, Juan Guaido kemudian bersumpah dan secara konsisten menentang upaya Maduro untuk memblokir pasokan bantuan ke Venezuela. Alasan lainnya adalah Maduro menyebut bantuan tersebut sebagai tipu daya neoliberalisme yang ingin mendongkel Maduro dan membuktikan bahwa bolivarianisme yang selama ini dipegang teguh pemerintah Venezuela sudah tidak relevan lagi dalam kondisi krisis ini dan kedepannya nanti. Hal tersebut dirasa sangat efektif mengingat pemerintah dicap sudah tidak mampu untuk mengendalikan ekonominya berdasarkan ideologi sosialisme bolivarian.

Selain itu, Venezuela mengkambinghitamkan Amerika Serikat atas kekacauan dengan terlibat dan menghasut pemberontak. Penulis merasa bahwa kebijakan Venezuela lebih memperhatikan stabilitas keamanan domestiknya dengan memperkuat posisi strategis melalui militer dan kebijakan represif dalam sentralitas kekuatan nasional. Amerika Serikat sendiri memandang kebijakan Venezuela, khususnya rezim Maduro, merupakan implementasi dari otoritarianisme yang mengarah pada kediktatoran yang intoleran terhadap perkembangan zaman dan globalisasi. Di waktu yang sama, ideologi bolivarianisme merupakan halangan besar bagi Amerika Serikat untuk melancarkan proyek perdagangan bebas. Hal lainnya yang menjadi catatan untuk Amerika Serikat

adalah pola permusuhan yang terjadi dapat mengancam stabilitas energi Amerika Serikat mengingat bahwa hubungan kemitraan perdagangan yang telah terjalin sejak lama sudah menimbulkan ketergantungan antara kedua negara. Amerika merupakan importir besar dari minyak Venezuela. Namun, Venezuela juga mengimpor bahan pengencer minyak dan teknologi perminyakan dari Amerika. Akan menjadi masalah besar jika hubungan permusuhan antara kedua negara berlanjut secara berkepanjangan, ancaman pemutusan diplomatik menjadi halangan bagi Amerika untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan alam melimpah Venezuela. Jelas bahwa di masa sekarang amerika harus lebih memprioritaskan pengamanan suplai minyak dan gas.

Akan tetapi, Amerika Serikat juga perlu mempertimbangkan kepentingan nasionalnya dengan menetapkan sanksi yang dimulai pada tahun 2015. Pemerintahan Obama telah menyatakan Venezuela sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS dan membekukan aset beberapa pejabat Venezuela. Adapun Presiden Donald Trump mengintensifkan sanksi pada 2017 dan tahun ini memberlakukan embargo minyak yang memblokir pembelian minyak dari perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA. Pemerintah AS juga telah membekukan “\$5,5 miliar dana Venezuela di rekening internasional di setidaknya 50 bank dan lembaga keuangan. Mereka juga menyita anak perusahaan Venezuela di AS, CITGO, senilai \$8 miliar. Itu merupakan pukulan besar bagi Venezuela, yang menerima 90% pendapatan pemerintah dari industri minyak (MAPA, 2021).

Jelas bagi Amerika Serikat bahwa ada beberapa prioritas di mana mereka harus menyeimbangkan kepentingannya dalam hal hegemoni/branding serta kepentingan untuk mengeruk keuntungan dan mempertahankan stabilitas energi domestik. Sebaliknya, Venezuela perlu melonggarkan kebijakan dan berupaya terlebih dahulu mendapatkan dukungan domestik. Posisi Venezuela dalam hal ini berada dalam keadaan yang tidak begitu menguntungkan apabila masih berada dalam konflik internal. Menurut penulis terdapat beberapa posisi strategis yang dihadapi Amerika Serikat dan Venezuela dapat dilihat dari pendekatan realisme. Pertama, kedekatan Rusia, Iran, dan China dengan Venezuela saat krisis. Kondisi ini seharusnya patut dikhawatirkan Amerika Serikat karena Venezuela memiliki sumber daya alam, baik minyak dan uranium, dan kemauan untuk terlibat dalam perdagangan senjata dan kerja sama nuklir dengan negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. Kedua, pengaruh Venezuela di kawasan Amerika Latin. Semangat nasionalisme Venezuela di bawah pemerintahan Maduro sangat tinggi. Melalui paham bolivarianismenya Venezuela cukup kuat dalam memikat negara-negara Amerika Latin. Aliansi regional (ALBA) dibentuk dengan minyak Venezuela dengan mitra utama Kuba sebagai negara berpaham kiri mampu mengkonsolidasikan integrasi politik regional berdasarkan visi kesejahteraan sosial dan “anti-imperialisme.” Untuk itu Amerika Serikat perlu meng-*counter* dengan bekerja dengan sekutunya di seluruh kawasan dan menekan Venezuela dengan sanksi dan perjanjian. Ketiga, faktor kedekatan geografis. Venezuela hanya berjarak 1.300 mil dari lepas pantai Miami. Secara positif, faktor ini memberikan keuntungan yang banyak apabila terjadi hubungan perdagangan seperti biaya tarif dan transportasi yang lebih murah. Secara negatif, konflik berkepanjangan di Venezuela dapat menimbulkan lonjakan pengungsi yang seringkali berimplikasi pada kejahatan

transnasional. Keempat, adanya krisis kemanusiaan selama rezim Maduro. Kekurangan pangan di Venezuela telah meningkat dari tahun ke tahun beberapa komoditas paling langka ada pada obat-obatan. Hal ini mengakibatkan banyaknya persebaran penyakit dan epidemi di Venezuela. AS dapat memanfaatkan momentum ini untuk memikat hati masyarakat dan menaikkan citra neoliberalisme melalui bantuan-bantuan kemanusiaan.

Kesimpulan

Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela awalnya sangat baik, bahkan menjalin kerja sama. Namun, hutang luar negeri Venezuela adalah faktor penyebab krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela sehingga membuat mereka menjadi dijauhi dan sangat susah untuk bergerak. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi Venezuela karena mereka harus menjalankan SAP yang menyebabkan krisis makin parah, karena berimbas langsung terhadap rakyatnya. Akan tetapi, berkat pemikiran Presiden Chavez yang menasionalisasikan aset-aset negara terutama perusahaan minyak, Venezuela berhasil membayar hutang-hutangnya. Hingga pada tahun 2007, mereka menyatakan keluar dari organisasi IMF. Hutang-hutang tersebut menyebabkan *struggle for power* untuk negara Venezuela yang menyebabkan mereka berpikir lebih keras sehingga bertindak sendiri karena ketidakpercayaan terhadap sistem kapitalis. Di sisi lain hal ini menyebabkan Amerika Serikat mengambil tindakan untuk menyebarkan pengaruh neoliberalnya, yaitu menempatkan pasukan militer di markas militer yang terdapat di Kolombia. Tujuannya adalah untuk memantau proses perdagangan yang ada di Amerika Selatan terutama negara Venezuela yang memiliki minyak dan emas serta menjadi incaran. Namun, Venezuela merespon dengan menarik duta besarnya dari negara Kolombia kemudian membentuk organisasi ALBA yang dipakai untuk mempertahankan pengaruh Bolivarianisme di Amerika Selatan dan Karibia serta selanjutnya Venezuela bekerjasama dengan negara-negara seperti Cina, Rusia dan Iran yang merupakan negara-negara penentang AS. Tindakan ini dilakukan untuk menyadarkan AS bahwa setiap negara berhak memiliki idealismenya sendiri dan tidak terikat oleh propaganda atau dominasi yang dilakukan oleh AS, Seperti pemikiran Bolivarian Chavez yang diwariskan hingga sekarang di Venezuela.

Venezuela mengalami inflasi yang sangat parah bahkan meskipun ingin bertahan dengan cara meminjam uang dan memperoleh investor dari negara kontra AS seperti Cina dan Rusia, inflasi yang terjadi tetap semakin parah setiap tahunnya dan menyebabkan terjadinya banyak protes oleh warga dan berujung kepada kekerasan. Dalam hal ini Venezuela sangat dirugikan karena tindakan seperti redenominasi mata uang yang hanya akan menambah biaya pembuatan serta nilainya yang sama saja dengan uang sebelumnya, kemudian pencetakan uang berlebih yang menyebabkan banyaknya uang beredar dan membuat nilainya menjadi semakin turun, mengingat kekerasan yang terjadi juga telah menyebabkan banyak sekali warga Venezuela mengungsi, dan Amerika Serikat menggunakan ini sebagai momentum untuk membawa pengaruhnya di negara Venezuela dengan cara mendukung pihak oposisi dan memberikan bantuan yang dicurigai hanya sebagai alat untuk mendapatkan pengaruh. Adapun dampaknya terhadap posisi strategis AS dan Venezuela adalah: 1) kedekatan strategis antara Venezuela dengan negara kontra AS menimbulkan ancaman baru terhadap hegemoninya di Amerika Latin; 2) Pengaruh



besar tekanan kelompok aliansi masing-masing negara di kawasan dalam menghadapi satu sama lain; 3) Kedekatan geografis yang menjadi nilai positif bagi kerjasama dan negatif bagi keamanan; 4) krisis kemanusiaan yang dapat dimanfaatkan AS untuk menjaga martabatnya sebagai negara adidaya. Kenyataannya Venezuela dan Amerika Serikat masih saling membutuhkan walaupun tampaknya Amerika terlihat diatas angin. Jika konflik keduanya terus berlanjut bukan tidak mungkin akan menyusahkan kedua belah pihak.

Referensi

- Akbar, Hikmatul dan Luh Risma Sandriati. "Aliansi Strategis Venezuela Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Studi Diplomasi Keamanan* Vol. 3 No. 2 (2011): 187-204, http://repository.upnyk.ac.id/8168/2/Hikmatul_Akbar_Sandiarti_Aliansi_Venezuela.pdf.
- Asrudin, Azwar. "Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma." *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)* Vol.1, No.2, (2014): 107-122, <https://jurnal.ugm.ac.id/globalsouth/article/download/28830/17358>.
- Baylis, John dan Steve Smith. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (second edition)*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- BBC. 2019. "Krisis Venezuela: Dari Rusia sampai Turki, mengapa banyak negara mengamati nasib Presiden Maduro?." *bbc.com*. Diakses pada 28 Mei 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47401020>.
- BBC. 2019. "Krisis Venezuela: Mengapa Rusia dan Amerika Serikat begitu tertarik dengan negara ini?," *bbc.com*, Diakses pada 26 Mei 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48209668>.
- Britannica. "*Hugo Chavez President of Venezuela*," *Britannica.com*. Diakses pada 27 Mei 2020. <https://www.britannica.com/biography/Hugo-Chavez>.
- CNN Indonesia. 2018. "Hiperinflasi, Venezuela Hapus Lima Angka Nol dari Mata Uang." *cnnindonesia.com*. Diakses pada 28 May 2020. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180726092333-134-317070/hiperinflasi-venezuela-hapus-lima-angka-nol-dari-mata-uang>.
- CNN Indonesia. 2018. "Linimasa Krisis Venezuela, Terus Memburuk Hingga Terpuruk." *cnnindonesia.com*. Diakses pada 28 Mei 2020. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180313040229-134-282479/linimasa-krisis-venezuela-terus-memburuk-hingga-terpuruk>.
- CNN Indonesia. 2019. "Maduro Sebut Bantuan Kemanusiaan Amerika Bentuk Tipu Daya." *cnnindonesia.com*. Diakses pada 28 Mei 2020. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190216111620-134-369817/maduro-sebut-bantuan-kemanusiaan-amerika-bentuk-tipu-daya>.
- Detik.com. 2018. "Hobi Cetak Uang dan Batasi Dolar AS, Venezuela Alami Inflasi Parah," *finance.detik.com*, Diakses pada 28 Mei 2020. <https://finance.detik.com/moneter/d-4178970/hobi-cetak-uang-dan-batasi-dolar-as-venezuela-alami-inflasi-parah>.
- EFE. 2017. "*Money printing, production plunge cause hyperinflation in Venezuela*." *efe.com*. Diakses pada 25 Juni 2022. <https://www.efe.com/efe/english/business/money-printing-production-plunge-cause-hyperinflation-in-venezuela/50000265-3428752>.
- EFE. 2018. "*Redenomination of Venezuelan currency made official in government gazette*." *efe.com*. Diakses pada 25 Jun 2022.

- <https://www.efe.com/efe/english/world/redenomination-of-venezuelan-currency-made-official-in-government-gazette/50000262-3722082>.
- Ferdiansyah, Bernardy. “Kebijakan Hugo Chavez di Venezuela Dalam Melawan Hegemoni Amerika Serikat.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Firdaus, Faradilla. “Strategi Perlawanan Venezuela dalam Menghadapi Tekanan Amerika Serikat melalui ALBA Tahun 2015-2017.” *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 12, No. 1(2019): 41-58, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1175338>.
- Forbes. 2018. “*IMF Produces Another Bogus Venezuela Inflation Forecast.*” *forbes.com*. Diakses pada 26 Mei 2020. <https://www.forbes.com/sites/stevehanke/2018/07/31/imf-produces-another-bogus-venezuela-inflation-forecast/#105704b57dc8>.
- FSEDAR. 2019. “Venezuela: Lingkaran Bolivarian, Pendorong dan Pelindung Revolusi.” *fsedar.org*. Diakses pada 28 Mei 2020. <https://fsedar.org/blog/venezuela-lingkaran-bolivarian-pendorong-dan-pelindung-revolusi/>.
- Levin, Judith. *Modern World Leaders: Hugo Chavez*. New York: Chelsea House Publishing, 2007.
- Mangkoesebroto, Guritno dan Algifari. *Teori Ekonomi Makro edisi III*. Yogyakarta: STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 1998.
- MAPA. 2021. “*US Sanctions and Venezuela’s Economy.*” *masspeaceaction.org*. Diakses pada 25 Juni 2022. <https://masspeaceaction.org/us-sanctions-and-venezuelas-economy/>.
- Militan Indonesia. “Venezuela: Gerak Menuju Sosialisme (Bagian 1).” *militanindonesia.org*. Diakses pada 28 Mei 2020. <https://www.militanindonesia.org/internasional/amerika-latin/venezuela/8086-gerak-menuju-sosialisme.html>.
- Pratiwi, Diah Ayu. “Respon Venezuela Terhadap Kehadiran Militer Amerika Serikat di Kolombia.” *Jurnal Dimensi Universitas Riau Kepulauan* Vol. 1, No. 3, (2012): 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.33373/dms.v1i3.178>.
- Raco, J. R.. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2013
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, edisi II. Depok: Universitas Indonesia, 2004.
- Sari, Nauriel Fitria. “Pengaruh Inflasi, BI Rate, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudarabah Terhadap Pertumbuhan Simpanan Deposito Mudarabah Pada BANK SYARIAH MANDIRI.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017.
- Suseno dan Siti Aisyah. *Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kesentralan Bank Indonesia 2009.
- US Embassy in Venezuela. “*Policy and History.*” *US Virtual Embassy, Venezuela*. Diakses pada 27 Mei 2020. <https://ve.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/>.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory (fifth edition)*. London: Pearson, 2012.
- VOA Indonesia. 2014. “Anjloknya Harga Minyak Dunia Tertajam di



Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol.27. No.1, bulan Juni, tahun 2022
P-ISSN: 2442-3424; E-ISSN: 2775-7501
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/index>

2014.”voaindonesia.com. Diakses pada 26 Mei 2020.
<https://www.voaindonesia.com/a/anjloknya-harga-minyak-dunia-tertajam-di-2014/2582337.html>.

World Bank. 1989. *Venezuela - Structural Adjustment Loan (English)*. Washington, DC: World Bank, 1989.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/209871468317354557/Venezuela-Structural-Adjustment-Loan>.